



# LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN  
JEMBER

**TAHUN 2024**

TAHUN 2025

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2024, yaitu "mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman".

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 20 (Dua puluh) indikator tergolong Sangat Baik

*Sasaran 2* : Terciptanya Situsi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 6 (enam) indikator tergolong Sangat Baik

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 100% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.113.305.711.738,00 terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.3.674.203.685,00 Belanja Barang dan Jasa Rp.5.597.582.100,00 Belanja hibah sebesar Rp.104.033.925.953,00.

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 105.114.447.916,00 (92,77%) dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Kegiatan di laksanakan sudah sesuai dengan anggaran, namun untuk mencapai target sasaran masih belum maksimal.
2. Tidak terserapnya hibah uang kepada Kodim 0824 Jember.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Program kegiatan akan direncanakan lebih baik.
2. Kegiatan akan lebih disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Jember, 04 Februari 2025

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER



**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650309 198602 1 002

## DAFTAR ISI

Hal :

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	7
E. SARANA PRASARANA .....	8
F. ANGGARAN .....	10
G. ISU STRATEGIS .....	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	17
C. PERJANJIAN KINERJA.....	18
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	22
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2024 .....	22
B. CAPAIAN KINERJA.....	23
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN..	26
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	52
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN .....	53
KEGAGALAN	
F. REALISASI ANGGARAN.....	55
BAB IV. PENUTUP.....	63

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD**
- Lampiran 5 Rencana Aksi**
- Lampiran 6. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan unsur Penunjang
- (2) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Wilayah Kabupaten.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  - b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuang bangsa dan politik.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
  - d. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan.
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang nina ideology, wawasan kebangsaan, Karakter Bangsa, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri, Kehidupan Demokrasi, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan.
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (5) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, terdiri dari atas :
    - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari atas kelompokn jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (6) Uraian Tugas dan Fungsi :
- a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, megkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk menjalankan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    - Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
    - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian perencanaan pelaporan dan Keuangan dilingkungan Badan;

- Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum kepegawaian perencanaan pelaporan dan Keuangan dilingkungan Badan;
  - Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan dan;
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- b. Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan **dan menyelenggarakan fungsi :**
- Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
  - Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
  - Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesedaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

**Dan menyelenggarakan fungsi :**

- Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten.
  - Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik diwilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan monitoring,evaluasi,dan pelaporan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum\pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situsasi politik diwilayah kabupaten;dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- d. Bidang ketahan ekonomi,sosial budaya,agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,efaluasi dan radiasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing.

### **Dan menyelenggarakan fungsi :**

- Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi,sosial budaya,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah kabupaten.
  - Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial,budaya,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,soisal,budaya fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,social,budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,efaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah kabupaten.
  - Pelaksanaan monitoring,evaluasi, dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat dan kepercayaan serta pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan norma dan norma asing diwilayah kabupaten;dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- e. Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten dibidang kewaspadaan dini,kerja sama inteljen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing,kewaspadaann perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik diwilayah kabupaten.

**Dan menyelenggarakan fungsi :**

- Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini,kerjasama inteljen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik diwilayah kabupaten.
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,kerjasama inteljen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik diwilayah kabupaten.
- Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,kerja sama inteljen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik diwilayah kabupaten.
- Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini,kerja sama inteljen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik diwilayah kabupaten.
- Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini,kerja sama inteljen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik diwilayah kabupaten;dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan

**D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah

diupdate melalui SIMPEG sebanyak 20 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 61 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 41 orang atau 67 %.Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						Jumlah		
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	L	P
Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1						1	1	-
Jabatan Administrasi															
1. Administrator	5				3	2	5				1	2	2	4	1
2. Pengawas	1				1		1					1		-	1
3. Pelaksana	37	2	15	8	12		10		7			3		7	3
Jabatan Fungsional	17				17		3			1		1	1	1	2
Non ASN							12		8			4		10	2
Jumlah	61	2	15	8	33	3	32		15	1	1	11	4	23	9

**Sumber:** Data Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik belum memenuhi/ sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Kabupaten Jember.

## **E. SARANA PRASARANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menempati gedung di Jl. Letjen. S. Parman N0. 89 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Cukup) memadai, karena terciptanya rasa nyaman bagi karyawan. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik data sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Alat angkut			
	Roda 4	4	B	7
	Roda 2	6	B	6
2	Alat-alat kantor dan rumah tangga			
	AC	9	B	12
	Almari	11	B	15
	Filing kabinet	25	B	25
	Meja dan kursi tamu	1	B	1
	Meja kayu	11	B	11
	Meja kayu pendek	3	B	3
	Meja pimpinan kayu	3	B	3
	Mesin ketik	4		
	Papan bagan organisasi	1	B	1
	Papan nama	1	B	1
	Rak	2	B	4
	gordyn	1	B	1
	Kipas angin	2	B	2
	Lemari es	1	B	1
	Lukisan	1	B	1
	Magic com	1	B	1
	TV	7	B	1
	Handy cam	3	R	3
	Karpet	1	B	1
	Camera	4	B	4
	Megaphone	2	B	2
	Papan Pengumuman	1	B	1

	Tandon	1	B	1
	Vacum cleaner	1	B	1
	Sound System	1	B	1
	Gbr. Presiden & Wakil	1	B	1
	Dispenser	1	B	1
	Tiang Bendera	1	B	1
	Podium	1	B	1
	Peta	1	B	1
	Telepon Faximile	1	B	1
	Partisi jaringan Wifi (peralatan)	1	B	1
	Komp/note book /lap top	17	B	17
	Personal computer	12	B	12
	Printer	22	B	22
	Hardisk external	2	B	2
	UPS	11	B	11
	Meja kerja	42	B	42
	Kursi kerja	33	B	33
	Kursi lipat	250	B	250
3	Alat Studio			
	Proyektor	7	B	7
	Layar Proyektor	2	B	2
	Camera	4	B	4
	Jumlah	517		519

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024

## F. ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki 6 Program, 9 Kegiatan, dan 20 Sub.

Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.113.305.711.738,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp,-)</b>
<b>1</b>	<b>Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>4.999.216.885,-</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	<b>4.076.643.685,-</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.377.803.685,-
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	698.840.000,-
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>402.033.500,-</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.177.800,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.427.700,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.554.000,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.050.000,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.864.000,-
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>217.286.100,-</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.600.000,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.226.100,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.460.000,-
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan</b> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>303.253.600,-</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.804.000,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.449.600,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,-
<b>2.</b>	<b>Program Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.683.370.800,-</b>

2.1	<b>Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.683.370.800,-
	<b>Sub Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.683.370.800,-
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	91.183.809.853,-
3.1	<b>Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	91.183.809.853,-
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	91.183.809.853,-
4	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	89.741.700,-
4.1	<b>Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	89.741.700,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	89.741.700,-
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	568.286.100,-
5.1	<b>Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	568.286.100,-
	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	568.286.100,-
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	14.781.286.400,-

<b>6.1</b>	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14.781.286.400,-
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.576.301.400,-
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	204.985.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>113.305.711.738,-</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Kerukunan Umat Beragama

Beragama dan Fasilitasi Kerjasama Ormas

5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember yaitu

Misi ke 2 : Membangun tata kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen Pembangunan Daerah lainnya

Tujuan : ke-1 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran Strategis Kabupaten ke 10 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik

Indikator Tujuan 1 : Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Indikator 1 : Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator 2 : Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Jember tahun 2021-2026  
tc 25

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien

Indikator Tujuan 2 : NILAI SAKIP

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah profesional, efektif, dan efisien nyaman	Persentase indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Bakesbangpol Kab. Jember tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator Program Yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100$	Data Pelaksanaan Program Bakesbangpol	Bakesbangpol

perangkat daerah				
		Penjelasan indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		
Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, Tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik yang terjadi}} \times 100$	Tim Wawasan Dini Kabupaten Jember	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		<b>Penjelasan Indikator :</b> - Jumlah konflik terjadi : berdasarkan data konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun ke-n , dan terdata pada Bakesbangpol - Jumlah konflik yang tertangani : berdasarkan data / laporan penanganan konflik sosial tahun ke-n pada Bakesbangpol		

Sumber : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember No. 065/05/35.09.415/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.999.216.885,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.683.370.800,-	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 91.183.809.853,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 89.741.700,-	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 568.286.100,-	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 14.781.286.400,-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 113.305.711.738,-</b>	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2024

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah Didukung oleh :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 4.999.216.885,-
  - Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp. 1.683.370.800,-
  - Program Peran Partai Politik dan Lem,baga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran Rp. 91.183.809.853,-
  - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 89.741.700,-
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp. 568.286.100,-
  - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik social dengan anggaran Rp. 14.781.286.400,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.113.305.711.738,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

- b) Sasaran Strategis II : Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman, Didukung oleh :
- Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp. 1.683.370.800,-
  - Program Peran Partai Politik dan Lem,baga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran Rp. 91.183.809.853,-
  - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 89.741.700,-
  - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp. 568.286.100,-
  - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas

dan Fasilitasi Penanganan Konflik social dengan anggaran Rp. 14.781.286.400,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp108.306.494.853,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 95,6% dari keseluruhan belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
	Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	------	------	------	------	------

Sumber Data Realisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 2 indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 100% Dengan demikian maka secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

#### **Realisasi Sasaran 1 :**

Berdasarkan data realisasai program Bakesbangpol th. 2024

- Jumlah indikator program Bakesbangpol 6
- Jumlah indikator program yang mencapai target sebanyak ..

Persentase Indikator Program yang tercapai = 6

$$\frac{\text{Indikator Program Yang tercapai}}{\text{indikator program}} \times 100 = 100\%$$

Angka realisasi ini belum mencapai target tahun 2024

#### **Realisasi sasaran 2 :**

berdasarkan data laporan penanganan konflik th 2024

- Jumlah data konflik sosial tahun 2024 sebanyak 20
- Jumlah konflik sosial tahun 2024 yang tertangani sebanyak 20

Persentase Konflik sosial yang tertangani =

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik yang terjadi}} \times 100$$

Telah terelaisasi sesuai target tahun 2024

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas pencapaian Target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%
Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%	100%

*Sumber Data Realisasi: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik*

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan efektifitas target kinerja perangkat Daerah  
Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Untuk ukuran keberhasilan sasaran ini diukur dengan perhitungan persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)

**Tabel 3.4**  
**(Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya efektifitas target kinerja perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	-	-
2	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	-	-

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember*

Realisasi kinerja atas indikator Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi

kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

Ukuran keberhasilan sasaran ini diukur dengan perhitungan Persentase Indikator Program yang tercapai, yaitu dengan cara menghitung prosentase indikator program yang tercapai dibagi indikator program di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2024 .

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggar an (Rp.... )	Realisasi (Rp....)	% Serap an Angg aran
Sasaran 1 :	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	113.305.711.738,-	105.114.447.916,-	92,77%
Meningkat nya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	<b>Kegiata</b>  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.076.643.685,-	3.667.793.638,-	89,97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.377.803.685,-	3.013.879.708,-	89,23%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si	698.840.000,-	653.913.930,-	93,57%
	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.033.500,-	317.813.199,-	79,05%

	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.177.800,-	4.088.842,-	97,87%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.427.700,-	63.365.800,-	96,85%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.554.000,-	17.492.600,-	99,65%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000,-	3.160.000,-	79,80%
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	76.050.000,-	65.204.500,-	85,74%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.864.000,-	164.501.457,-	70,04%
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.286.100,-</b>	<b>131.537.084,-</b>	<b>60,54%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.600.000,-	77.874.084,-	56,19%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.226.100,-	9.204.000,-	99,76%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.460.000,-	44.459.000,-	64,01%

	<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>303.253.600,-</b>	<b>244.769.145,-</b>	<b>80,71%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.804.000,-	68.345.725,-	76,11%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.449.600,-	141.458.420,-	79,27%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,-	34.965.000,-	99,90%
	<b>Program Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.683.370.800,-</b>	<b>1.569.867.900,-</b>	<b>93,26%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>1.683.370.800,-</b>	<b>1.569.867.900,-</b>	<b>93,26%</b>

	Sub. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.683.370.800,-	1.569.867.900,-	93,26%
	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>91.183.809.853,-</b>	<b>87.314.499.200,-</b>	<b>95,76%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	<b>91.183.809.853,-</b>	<b>87.314.499.200,-</b>	<b>95,76%</b>

	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	91.183.809.853,-	87.314.499.200,-	95,76%
	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>89.741.700,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	<b>89.741.700,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	89.741.700,-	0	0

	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>568.286.100,-</b>	<b>471.255.250,-</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<b>568.286.100,-</b>	<b>471.255.250,-</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<b>568.286.100,-</b>	<b>471.255.250,-</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>14.781.286.400,-</b>	<b>11.396.912.500,-</b>	<b>77,10%</b>
	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<b>14.781.286.400,-</b>	<b>11.396.912.500,-</b>	<b>77,10%</b>

	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.576.301.400,-	11.246.415.500,-	77,16%
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	204.985.000,-	150.497.000,-	73,42%
<b>Total</b>		<b>113.305.711.738,-</b>	<b>105.114.447.916,-</b>	<b>92,77%</b>
<b>Sasaran 2 :</b>	<b>Program Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.683.370.800,-</b>	<b>1.569.867.900,-</b>	<b>93,26%</b>

Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>1.683.370.800,-</b>	<b>1.569.867.900,-</b>	<b>93,26%</b>
	Sub. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.683.370.800,-	1.569.867.900,-	93,26%
	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>91.183.809.853,-</b>	<b>87.314.499.200,-</b>	<b>95,76%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	<b>91.183.809.853,-</b>	<b>87.314.499.200,-</b>	<b>95,76%</b>

	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik			
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	91.183.809.853,-	87.314.499.200,-	95,76%
	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>89.741.700,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<b>89.741.700,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	89.741.700,-	0	0
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>568.286.100,-</b>	<b>471.255.250,-</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<b>568.286.100,-</b>	<b>471.255.250,-</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	568.286.100,-	471.255.250,-	82,93%
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>14.781.286.400,-</b>	<b>11.396.912.500,-</b>	<b>77,10%</b>

	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<b>14.781.286.400,-</b>	<b>11.396.912.500,-</b>	<b>77,10%</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di	14.576.301.400,-	11.246.415.500,-	77,16%
	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	204.985.000,-	150.497.000,-	73,42%
<b>Total</b>		<b>108.306.494.853,-</b>	<b>100.752.534.850,-</b>	<b>93,00%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman adalah sebagai berikut :

1. **Program** : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

**Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**Sub Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.683.370.800,-	1.569.867.900,-
Output	Jumlah dokumen 1	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, tanggal 13 s/d 15 September. Dan terealisasi 1 ( satu ) kali kegiatan bertempat di Secaba Rindam V/ Brawijaya dan diikuti dari 25 sekolah pelajar SMA/MA/SMK sederajat se-Kabupaten Jember dengan target peserta sejumlah 250 orang terealisasi 250 orang. Dengan rincian Laki-laki : 159 orang, Perempuan : 91 orang

Kegiatan : Seleksi Pembentukan Paskibraka dilakukan pada bulan Februari 2024 dengan peserta dari SMA/MA/SMK sederajat se-Kabupaten Jember sejumlah : 374 pelajar dengan rincian laki-laki : 268 orang perempuan : 106 orang. Sedangkan Jumlah pelajar yang terseleksi sejumlah 75 orang dengan rincian laki-laki : 38 orang, perempuan : 37 orang. Sehingga kegiatan seleksi pembentukan Paskibra dapat terealisasi dengan baik.

Kegiatan Pertemuan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dapat dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Kendala penyebab realisasi rendah dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan pada sub. Kegiatan tersebut sehingga Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan.



Dok. Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara



Dok. Kegiatan Paskibraka



terrealisasikan sejumlah 279 orang.

Kegiatan Rakor tim verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Banpol) Tahap 1 dilaksanakan tanggal 16 Juli 2024 di Aula Nusantara Bakesbangpol tanggal 26 Juli 2024. Rakor tim verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Banpol) Tahap 2 dilaksanakan tanggal 20 Desember 2024



Dok. Bimbingan Teknis (Bimtek) tahap I Tim Pelapor Desk Pilkada Th. 2024 tingkat Kecamatan se-Kabupaten Jember di Aula Nusantara Bakesbangpol.



Dok. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pelapor Desk Pilkada Th. 2024 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Jember di Aula Dinas Pendidikan.



Rakor tim verifikasi Banpol Tahap 1 dilaksanakan tanggal 16 Juli 2024 di Aula Nusantara Bakesbangpol



Dok. Rakor tim verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Banpol) Tahap 2 dilaksanakan tanggal 20 Desember 2024

3. **Program** : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	89.741.700,-	0
Output	Jumlah dokumen 0	Dokumen	0 Dokumen	0

Menidaklanjuti hasil rapat koordinasi Pemenuhan syarat kelengkapan pemberian tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menugaskan Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan staf melakukan kunjungan untk mengkomunikasikan Rekomendasi pada ormas Forum Nelayan Puger Bangkit (FNPB) Kabupaten Jember yang beralamat di desa Puger Kulon Kec. Puger. Permasalahan tidak dapat terealisasinya kegiatan ormas : Situasi menjelang Pilkada kurang kondusif dan akan direncanakan pada tahun 2025.

4. **Program** : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

**Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Sub Kegiatan** : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	568.286.100,-	471.255.250,-
Output	Jumlah dokumen 1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kegiatan Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah Al Irfany Kecamatan Patrang dengan peserta dari Santri/SMA/MA/SMK sederajat se-Kabupaten Jember sejumlah :100 pelajar. Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasi dengan baik

Kegiatan Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada 16 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Darul Muqomah Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas dengan peserta dari Santri/SMA/MA/SMK sederajat se-Kabupaten Jember sejumlah : 100 pelajar Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasi dengan baik.

Kegiatan Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Al Imam Desa Gambiran Kecamatan Kalisat dengan peserta dari Santri/SMA/MA/SMK sederajat se-Kabupaten Jember sejumlah : 100 pelajar Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasi dengan baik.

Kegiatan Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Al Imam Desa Gambiran Kecamatan Kalisat dengan peserta dari Santri/SMA/MA/SMK sederajat se-Kabupaten Jember sejumlah : 100 pelajar Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasi dengan baik.

Kegiatan Jember Pluralitas Hub (JPH) tema “Harmoni Wujudkan Kebudayaan Jember yang Beradab dan Bermanfaat” dilaksanakan pada 21 Juni 2024 bertempat Halaman Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dengan peserta dari Tokoh Penggiat Budaya se-Kabupaten Jember

sejumlah : 100 orang Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan

Sosialisasi dapat terealisasikan dengan baik.

Kegiatan Jember Pluralitas Hub (JPH) tema “Sarasehan Lansia Samatif Menuju Lansia Kabupaten Jember Yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif” dilaksanakan pada 26 Juli 2024 bertempat Halaman Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dengan peserta dari Lansia Karang Wreda melalui Yayasan Gerontologi Abiyoso Jember sejumlah : 100 orang Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasikan dengan baik.

Kegiatan Jember Pluralitas Hub (JPH) tema “Sarasehan Membangun Negeri Guna Meningkatkan Sinergitas Peran Purna Paskibraka Indonesia (PPI)” dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 bertempat Halaman Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember dengan peserta dari Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Jember sejumlah : 100 orang Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasikan dengan baik.

Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Sarasehan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan pada 10 Desember 2024 bertempat Hotel Luminor Jember dengan peserta Tokoh Lintas Agama se-Kabupaten Jember sejumlah : 100 orang Tingkat kehadiran 100 peserta, Sehingga kegiatan Sosialisasi dapat terealisasikan dengan baik.



Dok. Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah Al Irfany Kecamatan Patrang dengan



Dok. Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada 16 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Darul Muqomah Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas



Dok. Sosialisasi santri bersinar (bersih Narkoba) dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Al Imam Desa Gambiran Kecamatan Kalisat



Dok. Jember Pluralitas Hub (JPH) dilaksanakan tanggal 21 Juni 2024 sasaran Tokoh Penggiat Budaya tema "Harmoni Wujudkan Kebudayaan Jember yang Beradab dan Bermartabat"



Dok. Jember Pluralitas Hub (JPH) dilaksanakan tanggal 26 Juli 2024 sasaran Karang Wreda melalui Yayasan Gerontologi Abiyoso Jember tema “Lansia Samatif Menuju Lansia Kabupaten Jember Yang Sehat Mandiri, Aktif dan Produktif”



Dok. Jember Pluralitas Hub (JPH) dilaksanakan 18 Oktober 2024 sasaran Purna Paskibraka Indonesia (PPI) tema “Membangun Negeri guna Meningkatkan Sinergitas Peran Purna Paskibraka Indonesia (PPI)”





Dok. Forum Kerukunan Umat Beragama Sarasehan Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan pada 10 Desember 2024 bertempat di Hotel Luminor dengan peserta dari Tokoh Lintas Agama se-Kabupaten Jember .

5. **Program** : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

**Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Sub Kegiatan** : Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Uraian Input/Output	Satuan	Target	Realisasi
---------------------	--------	--------	-----------

Input	Jumlah Dana	Rp	14.576.301.400,-	11.246.415.500,-
Output	Jumlah dokumen 1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kegiatan Sarasehan/Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial “Sinergi Pemerintah, Aparat, dan Masyarakat dalam mencegah Konflik Sosial pada Pilkada 2024”. Tanggal 13 November 2024. Dengan Peserta Forkopimcam, Kasi Trantib dan Kasi Pemerintahan Kecamatan serta Kepala Dusun masing-masing Desa 3 (tiga) orang. (Kec. Jenggawah, Ambulu dan Wuluhan). Khusus Kecamatan Jenggawah juga menghadirkan Kepala Desa Kertonegoro dan 5 (lima) staf Desa Kertonegoro

Kegiatan Sarasehan/Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial “Merajut Kebersamaan untuk Jember yang Harmonis Pasca Pilkada serentak 2024. Tanggal 19 Desember 2024 di Kelurahan Tegalgede Kec. Sumpalsari. Peserta Forkopimcam Kec. Sumpalsari, Lurah Sumpalsari (7 orang), Ketua RW/Tomas : masing-masing Kelurahan (8 orang), Babinkamtibmas dan Babinsa Wil. Kec. Sumpalsari, RT/Toga/Tomas Kel. Tegal Gede (20 orang). Toga, Tomas Kecamatan Sumpalsari



Dok. Sarasehan/Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial “Sinergi Pemerintah, Aparat, dan Masyarakat dalam mencegah Konflik Sosial pada Pilkada 2024”. tanggal 13 November 2024



Dok. Sarasehan/Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial “Merajut Kebersamaan untuk Jember yang Harmonis Pasca Pilkada serentak 2024. Tanggal 19 Desember 2024 di Kelurahan Tegalgede Kec. Sumpersari.

**Sub Kegiatan :** Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah.

	Uraian Input/Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	204.985.000,-	150.497.000,-
Output	Jumlah dokumen 1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kegiatan Rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin) bertempat di Aula Nusantara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Dalam rangka menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai Potensi bentuk ancaman ,tantangan hambatan dan gangguan (ATHG)





Dok. Rakor Tim Wasdin bertempat di Aula Nusantara Bakesbangpol

1. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.377.803.685,-	3.013.879.708,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	orang	20	20

Sub Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	698.840.000,-	653.913.930,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Laporan	12	12

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satua	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	4.177.800,-	4.088.842,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

Sub Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	65.427.700,-	63.365.800,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	1	1

Sub Kegiatan : Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	17.554.000,-	17.492.600,-
Output	Jumlah pertanggungjawaban	Paket	1	1

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.960.000,-	3.160.000,-
Output	Jumlah pertanggungjawaban	Paket	12	12

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	76.050.000,-	65.204.500,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Paket	12	12

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	234.864.000,-	164.501.457,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Dokumen	12	12

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	138.600.000,-	77.874.084,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Laporan	2400	2400

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.226.100,-	9.204.000,-
Output	Jumlah pertanggungjawaban	Laporan	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	69.460.000,-	44.459.000,-
Output	Jumlah pertanggungjawaban	dokumen	1	1

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	89.804.000,-	68.345.725,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	3	3

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	178.449.600,-	141.458.420,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	9	9

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	35.000.000,-	34.965.000,-
Output	Jumlah laporan pertanggungjawaban	Unit	15	15

#### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berjumlah 32 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 113.305.711.738,- , melaksanakan 6 program 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100%	92,77%	Efisien
2. Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	100%	93%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar atau sama) daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja (lebih besar) daripada % serapan anggaran.

## E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024**

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100%	√				
<b>Indikator 1.1</b> Persentase Indikator	100%	√				

Program yang tercapai						
Rata rata capaian						
<b>Sasaran 2</b> Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	100%	√				
<b>Indikator 1.1</b> Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran meningkatnya mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan ini diukur dengan perhitungan Persentase Indikator Program yang tercapai, yaitu dengan cara menghitung presentase indikator program yang tercapai dibagi indikator program di Bakesbangpol.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah : Program kegiatan akan direncanakan lebih baik
- Rencana perbaikan kedepan apa : Efektifitas pelaksanaan kegiatan berjalan baik (Koordinasi dan Kolaborasi dengan instansi terkait).Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  3. Program Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial

Sasaran Strategis 2 : Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain kurangnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain terlaksananya kegiatan per bidang di Bakesbangpol
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Efektifitas pelaksanaan kegiatan berjalan baik (Koordinasi dan Kolaborasi dengan instansi terkait).
- Rencana perbaikan kedepan : Program kegiatan akan direncanakan lebih baik
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :
  1. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  2. Program Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial

## **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.113.305.711.738,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 113.305.711.738,- terealisasi sebesar Rp. 105.114.447.916,- (92,77%)
2. Belanja Modal sebesar Rp - terealisasi sebesar Rp. - (0%)

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp,-)</b>	<b>Realisasi (Rp,-)</b>	<b>% realisasi</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp.113.305.711.738,-	Rp.105.114.447.916,-	92,77%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.076.643.685,-	Rp. 3.667.793.638,-	89,97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.377.803.685,-	Rp. 3.013.879.708,-	89,23%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Rp. 698.840.000,-	Rp. 653.913.930,-	93,57%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 402.033.500,-	Rp. 317.813.199,-	79,05%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.177.800,-	Rp. 4.088.842,-	97,87%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 65.427.700,-	Rp. 63.365.800,-	96,85%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 17.554.000,-	Rp. 17.492.600,-	99,65%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.960.000,-	Rp. 3.160.000,-	79,80%
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 76.050.000,-	Rp. 65.204.500,-	85,74%

	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 234.864.000,-	Rp. 164.501.457,-	70,04%
1.3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.286.100,-	131.537.084,-	60,54%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 138.600.000,-	Rp. 77.874.084,-	56,19%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.226.100,-	Rp. 9.204.000,-	99,76%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 69.460.000,-	Rp. 44.459.000,-	64,01%
1.4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 303.253.600,-	Rp. 244.769.145,-	80,71%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 89.804.000,-	Rp. 68.345.725,-	76,11%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp. 178.449.600,-	Rp. 141.458.420,-	79,27%

	Lapangan			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.965.000,-	99,90%
2	Program Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.683.370.800,-	Rp. 1.569.867.900,-	93,26%
2.1	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.683.370.800,-	Rp. 1.569.867.900,-	93,26%
	Sub. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 1.683.370.800,-	Rp. 1.569.867.900,-	93,26%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	Rp. 91.183.809.853,-	Rp. 87.314.499.200,-	95,76%

	Budaya Politik			
3.1	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	Rp. 91.183.809.853,-	Rp. 87.314.499.200,-	95,76%
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Rp. 91.183.809.853,-	Rp. 87.314.499.200,-	95,76%
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 89.741.700,-	Rp. 0	0

4.1	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 89.741.700,-	Rp. 0	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 89.741.700,-	Rp. 0	0
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 568.286.100,-	Rp. 471.255.250,-	82,93%
5.1	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 568.286.100,-	Rp. 471.255.250,-	82,93%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Rp. 568.286.100,-	Rp. 471.255.250,-	82,93%

	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 14.781.286.400,-	Rp. 11.396.912.500,-	77,10%
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 4.781.286.400,-	Rp. 11.396.912.500,-	77,10%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 14.576.301.400,-	Rp. 11.246.415.500,-	77,16%

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Rp. 204.985.000,-	Rp, 150.497.000,-	73,42%
	Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah			
	<b>JUMLAH</b>	<b>113.305.711.738,-</b>	<b>105.114.447.916,-</b>	<b>92,77%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 2 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 2 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Terlaksannya kegiatan per bidang di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik (Koordinasi dan Kolaborasi dengan Instansi terkait)
3. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rutin

Beberapa kendala dalam capaian sasaran ini :

1. Tidak terserapnya anggaran hibah Pilkada ke Bawaslu dikarenakan ada perubahan besaran nilai proposal hibah
2. Kegiatan Ormas tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi menjelang Pilkada kurang kondusif
3. Tidak terserapnya anggaran hibah kodim 0824

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Program kegiatan akan direncanakan lebih baik
2. Kegiatan akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol

Demikian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

# RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

## MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan wawasan kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Membina berbagai Organisasi Masyarakat untuk menguatkan Ideologi pancasila dan wawasan Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat	Penataan dan Penguatan Organisasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Jember, 04 Februari 2024  
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER



Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650309 198602 1 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Letjen. S Parman NO. 89☎ 337853 Jember

## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Kondusif antara eksekutif, Legeslatif, Masyarakat dan komponen Pembangunan Daerah lainnya.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Publik daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

### RKT

TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
-----------	------------	------------------	--------------

Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Program Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD)	Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangan i	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan</b>					<b>1.683.370.800</b>
		Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangan i)		Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Kader Bela Negara.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wasbang, tersele nggaranya kegiatan	100%	1.683.370.800

						Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	forum Pembauran Kebangsaan dan tersele nggaranya pembe ntukan kader bela negara	
			Penghargaan Penanganan Konflik Sosial	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat</b>			<b>91.183.809.853</b>

			Penghargaan Pembina Ormas Terbaik	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik	Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Terselenggaraanya kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan dana pada partai politik serta sosialisasi Pemilu kepada masyarakat untuk menekan golput	100%	91.183.809.853
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	---	------	----------------

Pemantau an Situasi Politik						
<b>Program Pemberd ayaan dan Pengawa san Organisa si Kemasya rakatan</b>	kerjasam a antar lembaga organisas i kemasray akatan dan politik					<b>89.741.700</b>
<b>Keg. Perumus an Kebijakan Teknis dan Pemanta pan Pelaksan aan Bidang Pemberd ayaan dan Pengawa san Organisa si Kemasya rakatan</b>	terseleng garanya Forum Silaturah mi Ormas		Pelaksan akan Kebijakan dibidang Pendaftar an Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing Daerah	jumlah progra m kerja yang disusu n Forum silatura hmi Ormas /LSM	100%	89.741.700

--	--	--	--

<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>						<b>568.286.100</b>
---	---	--	--	--	--	--	--------------------



<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>						<b>14.781.286.400</b>
<b>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)</b>		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa	Terselenggaranya Sarasehan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100%	14.576.301.400

							daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	100%	204.985.000

							Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasa n Antar Negara, Fasilitas Kelembag aan Bidang Kewaspa daan serta Penangan an Konflik di Daerah		
							JUMLAH		108.306.494.853

Jember, 04 Februari 2024  
 KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN JEMBER



Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19650309 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JL. S. Parman No. 89 Jember

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Selanjutnya disebut pihak pertama.  
Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.  
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,

  
Ir H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng

Pihak Pertama

KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK

  
Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
NIP. 19650309 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100 %
		Penghargaan Penanganan Konflik Sosial	1 Penghargaan
		Penghargaan Pembina Ormas terbaik	1 Penghargaan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.999.216.885	APBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.683.370.800	APBD
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 91.183.809.853	APBD
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 89.741.700	APBD
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 568.286.100	APBD
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 14.781.286.400	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 113.305.711.738</b>	<b>APBD</b>

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Pihak Pertama



Drs. SIGIT AKBARI, M. Si  
NIP. 19650309 198602 1 002

**KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH**  
Tabel Tc. 25 Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

**RUTIN**

**SASARAN RPJMD** : Meningkatkan Wawasan Kebangsaan masyarakat dan stabilitas politik daerah

**INDIKATOR** : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien		Nilai SAKIP OPD	B	B	B	B	B
		Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai daerah	100%	100%	100%	100%	100%

**NON RUTIN**

**SASARAN**

**RPJMD** : Meningkatnya Wawasan kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah

**INDIKATOR** : Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah		Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	100%	100%	100%	100%	100%

Jember, 27 April 2023

Diverifikasi Oleh :  
**KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER**

**Drs. HADI MULYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661107 198809 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198602 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S. Parman No. 89 Telp. 0331-337853 Jember

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

**Nomor : 065/ 05 /35.09.415/2024**

### TENTANG

## INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Daerah nomor. 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 3 Januari 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 1986021 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program Yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Data Pelaksanaan Program Bakesbangpol	Bakesbangpol
			Penjelasan indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		
2	Terciptanya situasi, kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Persentase Konflik Sosial Daerah (Konflik yang tertangani)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terjadi}}{\text{Jumlah konflik yang tertangani}} \times 100\%$	Tim Wawasan Dini Kabupaten Jember	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

			<p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah konflik terjadi : berdasarkan data konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun ke-n , dan terdata pada Bakesbangpol</li> <li>- Jumlah konflik yang tertangani : berdasarkan data / laporan penanganan konflik sosial tahun ke-n pada Bakesbangpol</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



  
**Drs. SIGIT AKBARI, M. Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650309 198602 1 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

**RENCANA AKSI TAHUN 2024**

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/O UTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Tw. 1 : 25 %	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA</b>					
		Tw. 2 : 25 %						
		Tw. 3 : 25 %						
		Tw. 4 : 25 %						
			Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wawasan Kebangsaan melalui pembentukan dan pelatihan kader bela	Orang	Tw. 1 : 0 Tw. 2 : 0 Tw. 3 : 250 Tw. 4 : 0	

		negara bagi pelajar			
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					
Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Peningkatanj Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselengga ranya kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan pelaksanaa n penyaluran bantuan dana pada partai politik	Partai	Tw. 1 : 0 Tw. 2 : 11 Tw. 3 : 0 Tw. 4 : 0	

Politik					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN</b>					
Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	terselenggaranya pemutakhiran data ormas	Orang	Tw. 1 :106 Tw. 2 :110 Tw. 3 :115 Tw. 4 :120	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>					
Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah rencana kerja yg disusun 1. pemberdayaan FKUB 2 sarasehan kegiatan	Dokumen	Tw. 1 : 0 Tw. 2 : 4 Tw. 3 : 5 Tw. 4 : 0	

	Penghayat Kepercayaan Daerah	di	pengecahan penyalahgunaan narkoba 3. Jember Pluralitas Hub		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALIAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>					
Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Terselenggara Sarasehan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Sosialisasi Penanganan Konflik	Orang	Tw. 1 : 420 Tw. 2 : 720 Tw. 3 : 720 Tw. 4 : 720

			<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bldang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteljen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah</p>	<p>Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Laporan</p>	<p>Tw. 1 : 15 Tw. 2 : 20 Tw. 3 : 20 Tw. 4 : 20</p>
--	--	--	---	---	----------------	--

Jember, 1 Februari 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Drs. SIGIT AKBARI, M. Si**  
Pembina Utama Muda

NIP.19650309 198602 1 002